PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDEPENDENSI KURATOR DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
NOVITASARI, Prof. Dr. Tata Wijayanta. SH, M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Campbell, Black Henry, 1968, *Black law dictionary*, West Publishing CO, St. Paul Minnasota.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Fuady, Munir, 2010, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Hadi, M. Subhan, 2009, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik di Peradilan*, Raja Grafindo, Jakarta.

Hartini, Rahayu, 2008, Hukum *Kepailitan*, UMM Press, Malang.

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.

Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

----------, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

M.Hadjon Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*, Bina Ilmu, Surabaya.

Nainggolan Bernad, 2011, *Perlindungan Hukum Seimbang, Debitor,Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, PT. Alumni, Bandung.

Nating Imran, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grapindo Persada, Jakarta.

Noulan R Joseph, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing.CO, USA.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDEPENDENSI KURATOR DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
NOVITASARI, Prof. Dr. Tata Wijayanta. SH, M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Prinst Darwan, 2002, *Strategi Menyusun dan Menanggani Gugatan Perdata*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung.

Raharjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Sastrawidjaja Man S, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, Hukum Kepailitan; *Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Subekti R dan Tjitrosoedobio, 2000, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudiarawan Kadek Agus, 2014, *Kajian Terhadap Prinsip Tupe Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perkrja Dalam Pelaksanaan Outsourcing Berdasarkan PKWT*, Magister Hukum Bisnis UGM, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian –Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sutendi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Syahrani Riduan,2009, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung.

Wojowasito,1995, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT.Ichtiar Baru, Jakarta.

Yani, Ahmad dan Gunawan Wijaya, 2000, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Yuhassarie Emmy dkk, 2005, *Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Tahun 2004*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

B. Internet

Diakses tanggal 2 April 2015 http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/harta_pailit.aspx
http://digilib.unila.ac.id/8899/3/BAB%20II.pdf Diakases Tanggal 20 Mei 2015

http://bisniskeuangan.kompas.com/Dirut.Batavia.Air.Gugat.Balik.Tim.Kurator
Diakses Tanggal 18 Juli 2015

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDEPENDENSI KURATOR DALAM MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA MENGURUS DAN
MEMBERESKAN HARTA PAILIT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAANKEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
NOVITASARI, Prof. Dr. Tata Wijayanta. SH, M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undangan Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945)

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23)

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (*Staatsblad* Tahun 1915 Nomor 732)

Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang (UUKPKPU) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi, Manusia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata cara Pendaftaran Kurator.

Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Standar Profesi Kurator dan Pengurus.

D. Wawancara

Purba, Jamaslin, 2015, Independensi dan Perlindungan Kurator, *Wawancara*, Jakarta, 4 September.

Setianto, Bambang, 2015, Independensi dan Perlindungan Kurator, *Wawancara*, Pengadilan Niaga Semarang, 27 Agustus.

Sitanggang, Anselmus B.P, 2015, Independensi dan Perlindungan Kurator, *Wawancara*, Jakarta, 2 September.

Yustisia, Yuda, 2015, Independensi dan Perlindungan Kurator, *Wawancara*, Surabaya, 8 September.